

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu negara di dunia yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi adalah Indonesia. Selain itu, Indonesia juga merupakan salah satu negara di dunia yang masuk pada daftar negara berkembang. Di sebut berkembang karena beberapa alasan antara lain tingkat pemerataan ekonomi dan sosial yang masih rendah, standar hidup masyarakat masih terbilang tidak tinggi karena masih banyaknya rakyat yang hidup tidak layak, belum ada kesejahteraan pada masyarakat dan tingkat pendidikan rakyatnya dan kualitas pelayanan kesehatan yang belum ideal.

Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam yang berlimpah namun keterbelakangan pendidikan menyebabkan sumber daya alam tersebut tidak mampu dikelola dengan baik yang menyebabkan angka kemiskinan masih terbilang cukup tinggi. Dengan kondisi seperti ini membuat Indonesia menghadapi persoalan-persoalan rumit seperti tingkat kriminalitas tinggi, tingkat pendidikan rendah dan tingkat kesehatan rendah.

Kemiskinan secara umum adalah suatu situasi dimana seseorang atau rumah tangga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara lingkungan pendukungnya kurang memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkesinambungan atau untuk keluar dari kerentanan.

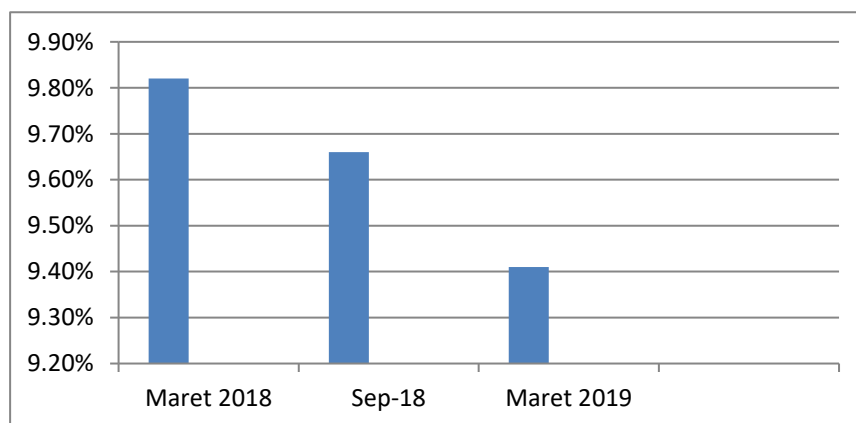
Menurut Kurniawan (dalam Ali Khomsan, dkk :2), kemiskinan adalah apabila pendapatan suatu komunitas berada dibawah satu garis kemiskinan tertentu.

Sedangkan menurut Suparlan (dalam Ali Khomsan, dkk :2), kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Sedangkan menurut **Undang-Undang No. 24 Tahun 2004**, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik. Kondisi yang disebut miskin juga berlaku pada mereka yang bekerja akan tetapi pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok/dasar.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Nasional pada Maret 2019, presentase penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia sebesar 9.41 persen menurun 0.25 persen terhadap September 2018 (sebesar 9.66 persen) dan menurun 0.41 persen terhadap bulan Maret 2018 (sebesar 9.82 persen). Sebagaimana yang dikutip dalam CNN Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penduduk miskin Indonesia pada Maret 2019 sebesar 25.14 juta penduduk. Angka ini menurun 810 ribu penduduk dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Presentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2018 sebesar 6,89 persen, turun menjadi 6.69 persen pada Maret 2019. Sementara presentase penduduk miskin di daerah pedesaan pada September 2018 sebesar 13,10 persen, turun menjadi 12,85 persen pada Maret 2019. Dibanding September 2018, jumlah penduduk miskin Maret 2019 di daerah perkotaan turun sebanyak 136,5 ribu orang (dari 10,13 juta orang pada September 2018 menjadi 9.99 juta orang pada Maret 2019). Sementara itu, daerah pedesaan turun sebanyak 393,4 ribu orang (dari 15.54 juta orang pada September 2018 menjadi 15,15 juta orang pada Maret 2019).



Gambar 1.1

Grafik Presentasi Penduduk Miskin Di Indonesia

Program-program yang dilaksanakan dalam upaya pengentasan kemiskinan selama ini belum mampu memberikan dampak besar sehingga sampai saat ini tujuan dari pembangunan nasional terkait dengan masalah pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat masih menjadi masalah yang berkepanjangan. Oleh karena itu, dalam rangka penanggulangan kemiskinan

berbasis rumah tangga. Pemerintah meluncurkan program khusus yang di beri nama Program Keluarga Harapan (PKH).

Sebagaimana menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan dengan menimbang “bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan melalui peningkatan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial,...” .

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan tunai bersyarat kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang memenuhi syarat kesepakatan dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial. (Kemensos RI, 2015: 2).

Tabel 1.1

Indeks Besaran Dana yang Diterima Peserta Program Keluarga Harapan (PKH)

No	Komponen Bantuan	Indeks Bantuan
1.	Bantuan tetap	500.000
2.	Bantuan ibu hamil dan menyusui	1.200.000
3.	Bantuan anak usia di bawah enam (6) tahun	1.200.000
4.	Bantuan peserta Pendidikan setara SD/MI sederajat	450.000
5.	Bantuan peserta Pendidikan setara SMP/MTs sederajat	750.000
6.	Bantuan peserta Pendidikan setara SMS/MA sederajat	1.000.000
7.	Bantuan penyandang disabilitas berat	3.100.000
8.	Bantuan lanjut usia 70 tahun ke atas	1.900.000

Sumber: Kementerian Sosial (2018)

Program Keluarga Harapan (PKH) tidak lepas dari kinerja pendamping Prrogram Keluarga Harapan (PKH). Menurut Mangkunegara (dalam Djamil Hasim:46), kinerja yaitu prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang. Sedangkan menurut Russel (dalam Djamil Hasim:47), kinerja merupakan catatan tentang hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu. Selanjutnya, menurut Prawirosentono (dalam Djamil Hasim:47), kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya untuk mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.

Apabila kinerja dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) telah dilaksanakan dengan baik maka akan tercapai kepuasan dari Keluarga Penerima Mnafaat (KPM). Kepuasan memiliki arti sebagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah puas; merasa senang; perihal (hal yang bersifat puas, kesenangan, kelegaan dan sebagainya). Kepuasan dapat diartikan sebagai perasaan puas, rasa senang dan kelegaan seseorang dikarenakan mengkonsumsi suatu produk atau jasa telah mendapatkan pelayanan suatu jasa dengan baik.

Bone Bolango merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Gorontalo yang telah merasakan adanya Program Keluarga Harapan yang di cetuskan oleh pemerintah. Kabupaten ini terdiri dari 18 kecamatan dan 160 desa dengan jumlah penduduk sebanyak 159.581 jiwa. Dengan presentase penduduk miskin sebesar 17.81 persen menurun sebsar 0.16 persen dari periode sebelumnya. Salah satu

kecamatan yang termasuk daftar penerima Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Kecamatan Suwawa Tengah. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ada di Kecamatan Suwawa Tengah sedikit demi sedikit mulai memahami pentingnya pendidikan dan kesehatan untuk mencapai kesejahteraan hidup. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sangat terbantu dengan adanya Program Keluarga Harapan yang dijumpai oleh pendamping. Kepuasan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Suwawa Tengah dilihat dari keaktifan mereka dalam mengikuti pelatihan dan pembekalan sebulan sekali dari pendamping yang dinilai sangat membantu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memahami materi-materi tentang Program Keluarga Harapan (PKH)

Tabel 2.1

Data Keluarga Penerima Manfaat Kecamatan Suwawa Tengah

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Keluarga Penerima Manfaat	297 KK
2.	Graduasi Mandiri	11 KK
3.	Graduasi Otomatis	10 KK
4.	Graduasi Paksa	5 KK
5.	Keluarga Penerima Manfaat yang Pindah	10 KK
6.	Total Keluarga Penerima Manfaat	329 KK

Sumber: Pendamping Program Keluarga Harapan Kecamatan Suwawa Tengah

Tahun 2020

Berdasarkan observasi awal peneliti di Kecamatan Suwawa Tengah, peneliti melihat dan merasakan bagaimana kondisi dan kualitas hidup masyarakat

khususnya yang berada di Kecamatan Suwawa Tengah. Kondisi keuangan yang menghambat pendidikan serta kesehatan merupakan masalah yang paling utama dirasakan oleh masyarakat Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Selain itu, sistem pelayanan yang diberikan masih kurang baik dan kurang cepat, keberadaan lokasi tempat pelayanan masih kurang diketahui oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM), petugas pelayanan masih kurang tepat waktu ketika menghadiri pertemuan dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), petugas pelayanan Program Keluarga Harapan (PKH) terkadang masih mementingkan kepentingan pribadi, kemampuan yang dimiliki oleh petugas pelayanan masih diragukan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM), pelayanan yang diberikan kurang tepat waktu, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masih merasakan kurangnya perhatian dari petugas pelayanan, serta tempat untuk melakukan pertemuan sosialisasi yang tidak menentu membuat beberapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak mempunyai alat transportasi merasa kesulitan. Akan tetapi kondisi ini berangsur-angsur membaik dan sudah bisa dikategorikan sejahtera sejak diterapkan Program Keluarga Harapan (PKH). Dalam penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) pendamping memegang peranan paling penting. Sistem kerja dari pendamping desa khususnya di Kecamatan Suwawa Tengah sudah tergolong baik. Setiap desa atau bahkan kecamatan memiliki satu orang pendamping. Pendamping inilah yang nantinya akan membantu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam menerima materi-materi tentang Program Keluarga Harapan (PKH). Saat memberikan materi dan pemahaman kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pendamping menggunakan metode *Family Development Session* (FDS) yang bertujuan

merubah perilaku dan pola pikir Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tentang pentingnya pendidikan dan kesehatan, pengelolaan keuangan keluarga, dan cara mengasuh anak. Pelaksanaan pendampingan ini dilakukan setiap sebulan sekali dengan metode yang sama yaitu *Family Development Session* (FDS).

Akan tetapi, peneliti menemukan masalah bahwa masih terdapat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di desa tersebut yang kurang memahami dan mengerti bagaimana tujuan utama di bentuknya Program Keluarga Harapan (PKH) sebagaimana yang disampaikan oleh pendamping desa dengan metode *Family Development Session* (FDS).

Oleh karena pemahaman setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berbeda-beda mengharuskan pendamping memiliki keterampilan lebih dalam memberikan materi *Family Development Session* (FDS) sehingga setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bisa memahami tujuan utama dari Program Keluarga Harapan (PKH).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kinerja Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kepuasan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Di Kecamatan Suwawa Tengah Provinsi Gorontalo”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti perlu mengidentifikasi masalah-masalah yang timbul. Hal ini digunakan untuk menyederhanakan

permasalahan dan memperjelas arah penelitian sesuai dengan judul yang telah dikemukakan. Masalah yang diidentifikasi diantaranya:

1. Terdapat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum memahami dengan tujuan utama Program Keluarga Harapan (PKH).
2. Terdapat beberapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengalami kesulitan memahami bahasa dari pendamping.
3. Terdapat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang kurang puas dengan materi-materi yang disampaikan pendamping disebabkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengalami kesulitan pendengaran.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang terjadi di lapangan, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut “Apakah kinerja pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) berpengaruh terhadap kepuasan Keluarga Penerima Manfaat (KPM)?”

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kinerja pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kepuasan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Organisasi menggunakan penelitian ini dapat diketahui peran pendamping terhadap kepuasan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

2. Bagi Praktis

Sebagai bahan informasi dan acuan untuk meningkatkan kinerja atau performa dalam bekerja.

3. Bagi pihak lain

Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk menambah pengetahuan dan sekaligus sebagai bahan perbandingan untuk penelitian yang serupa.